

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah “seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya”. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga dapat meregenerasi aktor politik baik di dalam pemerintahan maupun di dalam partai politik untuk melaksanakan peranannya. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup suatu sistem politik akan terancam. Surbakti, (2010:150-151).

Menurut Amal, (2012:31) rekrutmen dalam artian yang luas, menunjuk pada latihan (*training*) dan persiapan untuk kepemimpinan, terbuka untuk masyarakat, badan legislatif pemerintahan atau anggota partai yang lain, dan tentu saja untuk berkompetisi secara baik di dalam pemilihan. Sebagian dari mereka adalah pemimpin dalam masyarakat, kecuali mereka yang dapat mencapai jabatan pemerintahan tanpa masuk dan berpartisipasi secara aktif dalam partai.

Sedangkan menurut Pamungkas, (2009:90) rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya, apakah kekuasaan partai politik bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Dengan kata lain,

rekrutmen politik dapat mengetahui sejauh mana kekuasaan terkonsentrasi di pimpinan dan elit partai atau tersebar ke dalam struktur hierarki partai pada setiap tingkatan kepengurusan partai. Selain itu, rekrutmen politik juga menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik hingga menjadi indikator keberhasilan partai dalam memilih kader terbaiknya sebagai penentu wajah partai di ruang publik.

Labolo dan Teguh, (2015:19) menjelaskan bahwa proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat, yaitu :

a. Sistem Rekrutmen Politik Terbuka

Sistem rekrutmen terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

b. Sistem Rekrutmen Politik Tertutup

Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan dari pihak penguasa.

Thoha dalam Hesel (2003:189-190) mengklasifikasikan tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen, diantaranya :

1. Sistem patronik (*patronage system*), dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu pemikiran yang sama.

2. Sistem merit (*merit system*), sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas pertimbangan kecakapan. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan “*spoil system*”.
3. Sistem karir (*career system*), sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha yang dilakukannya secara dini dalam kehidupannya.

Siavelis dan Morgenstern, (2008) menjelaskan empat tipe calon legislatif yang dipertimbangkan partai politik, yaitu :

1. Loyalis partai (*party loyalis*). Kandidat tipe ini menunjukkan dan mempertahankan kesetiaan yang tinggi kepada para pimpinan partai maupun kepada organisasi partai politik tempatnya bernaung. Tipe loyalis partai cenderung menjadi pertimbangan partai politik ketika model seleksi kandidat dilakukan secara terpusat dan didominasi oleh elit politik. Kandidat dengan tipe loyalis partai ketika terpilih akan lebih mementingkan kepentingan partai politik yang berkaitan dengan ideologi dan program partai dibandingkan kepentingan konstituen pemilihnya.
2. Pelayan konstituen (*constituens servant*). Kandidat tipe ini memiliki hubungan yang moderat dengan partai politik (simpatisan), namun mempunyai pengaruh yang kuat pada konstituen, sehingga mampu mendongkrak perolehan suara partai politik. Kandidat dengan tipe ini relatif lebih loyal kepada kepentingan konstituen pemilihnya dibandingkan pada

kepentingan partai politiknya dan lebih baik dalam mencapai tujuan mereka melalui pengembangan dukungan konstituen. Kandidat dengan tipe ini dipertimbangkan menjadi calon legislatif jika keputusan penentuan kandidat dilakukan secara terdesentralisasi oleh partai politik kepada elit partai di tingkat lokal.

3. Pengusaha (*entrepreneur*). Kandidat tipe ini memiliki rasa setia yang sangat lemah terhadap konstituen maupun terhadap partai politik, hanya mencari dukungan konstituen pada masa-masa tertentu saja, tanpa ingin memelihara loyalitas konstituen dalam jangka waktu lama. Para aktor ini lebih dari sekedar kandidat “independen” dalam pengertian tradisional. Kandidat tipe ini jika terpilih akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan konstituen maupun partai politik. Kandidat dengan tipe ini lebih mungkin muncul dan dapat terpilih menjadi calon legislatif, jika sistem organisasi partai dilakukan secara terdesentralisasi ditingkat lokal, struktur pengambilan keputusan untuk pemilihan tidak formal dan birokratis, bahkan ditetapkan jadi calon legislatif secara tidak transparan dan dana kampanye diusahakan sendiri oleh kandidat yang bersangkutan.
4. Wakil kelompok (*group delegate*). Kandidat ini memiliki loyalitas yang lebih kepada kelompok sosial atau fungsional yang bersifat non partai politik, seperti wakil kelompok petani, serikat pekerja, etnik, agama, daerah tertentu dan lain sebagainya. Kandidat dengan tipe ini masih memiliki loyalitas yang moderat terhadap partai, namun dalam kondisi tertentu jika terpilih menjadi calon legislatif, biasanya lebih setia kepada kelompoknya

dibandingkan partai politik. Seorang delegasi akan lebih menjaga preferensi dan kepentingan kelompok fungsional terkait.

Terdapat beberapa tahapan dalam menentukan kandidat yang dilakukan oleh partai politik. Norris dalam Katz dan Crotty, (2015:149) mengatakan terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik yang diantaranya :

1. Sertifikasi, merupakan tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi seperti mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal.
2. Nominasi, meliputi ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan.
3. Seleksi, yakni tahap terakhir yang menentukan nama calon yang memenangkan pemilu.

Tahap sertifikasi dan nominasi dari proses rekrutmen politik merupakan domain penuh partai politik. Sedangkan pada tahap seleksi merupakan domain pemilih, yakni menjadi proses bagi pemilih dalam menentukan siapa calon yang layak dijadikan pemimpin. (Norris dalam Katz dan Crotty, 2015:149).

2.1.2. Teori Partai Politik

Secara etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa partai berasal dari kata latin, yakni “*pars*” yang berarti bagian. Sedangkan Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris, yakni “*part*” yang berarti bagian atau golongan. Sehingga partai menunjukan pada suatu bagian atau yang menunjuk pada golongan pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan

ideologi, tujuan, agama dan kepentingan. Pengelompokan golongan tersebut berbentuk suatu organisasi secara umum, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi politik.

Berdasarkan kedua konsep partai tersebut, maka kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai merupakan pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. (Labolo dan Teguh, 2015:9).

Beberapa ahli mendefinisikan partai politik, diantaranya ialah menurut Budiardjo, (2008:403-404) yakni “partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya”.

Menurut Thoha, (2012:92) dalam Senjaya dan Suryawahyuni, (2019:94) mengatakan bahwa “istilah partai yang melekat pada kata politik digunakan oleh suatu kelompok yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan ataupun tidak”.

Carl J. Friedrich dalam Budiardjo, (2008:404) menyebut “partai politik sebagai, sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil”.

Menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya, "*Modern Political Parties*", dalam Budiarmo, (2008:404) mendefinisikan "partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda". Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa partai politik menjadi perantara dalam menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi.

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Labolo dan Teguh, 2015:13).

1) Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Kehadiran partai politik tidak semata sebagai infrastruktur negara dalam jalannya demokratisasi di suatu negara, tetapi juga memiliki tujuan yang melekat dengan fungsi dari partai politik itu sendiri. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertera pada pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.

Cangara, (2021:172) tujuan umum partai politik berdasarkan pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cangara, (2021:173) sedangkan tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Cangara, (2021:173) selain tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Partai Politik pada pasal 10 ayat 1 dan 2, setiap partai politik memiliki kewenangan untuk menyusun tujuan partainya yang dituangkan dalam AD/ART partai politik. Terdapat fungsi dari partai politik dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Lutfi dan Iwan, (2016:39) secara pragmatis, tujuan partai politik tersebut dapat dikatakan berorientasi pada upaya merebutkan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu. Hal tersebut memiliki tujuan yang dimana, apabila partai politik tersebut memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, maka ideologi, visi dan misi serta program partai dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menjalankan kekuasaan di dalam pemerintahan, sehingga partai politik tersebut dapat memperoleh manfaat khususnya dalam bidang materil.

Selain memiliki tujuan, partai politik juga memiliki fungsi yang sebagaimana menurut Senjaya dan Suryawahyuni fungsi utama dari partai politik ialah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program

yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Pelaksanaan fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi melalui tiga kegiatan yang diantaranya meliputi penyeleksian calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif. (Senjaya dan Suryawahyuni, 2019:95).

Budiarjo, (2008:405-409) dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan fungsi partai politik di negara demokratis yang diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik membuat penggabungan kepentingan melalui agregasi dan artikulasi kepentingan, agar dapat diolah dan dirumuskan menjadi usul kebijakan ke dalam program atau platform partai untuk disampaikan melalui parlemen agar dijadikan kebijakan umum. Berdasarkan kepentingan yang lebih teratur dan tidak menimbulkan aspirasi yang saling berbenturan, menjadi salah satu fungsi dari partai sebagai sarana komunikasi politik.

Disisi lain partai politik juga berfungsi dalam menyebarluaskan rencana maupun kebijakan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Dengan begitu partai politik juga disebut sebagai perantara (broker) baik bagi pemerintah sebagai alat pendengar, dan bagi warga masyarakat sebagai penguat suara.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sarana sosialisasi politik ialah proses pembentukan seseorang atau masyarakat dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, sehingga menentukan sikap politik seseorang mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku

bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Partai politik menjadi penghubung dalam mensosialisasikan nilai-nilai politik kepada masyarakat melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Butuhnya kader-kader partai yang berkualitas, memberikan partai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri dan menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu rekrutmen politik juga memberikan partai politik untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Sebagaimana rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin baik di internal partai maupun sebagai pemimpin nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Majemuknya suatu masyarakat memberikan potensi terjadinya konflik di setiap adanya perbedaan baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Dengan begitu partai politik memiliki peranan untuk menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan

pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam di berbagai kelompok masyarakat.

2) Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologinya, partai politik diklasifikasikan pada beberapa jenis seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Surbakti, (2010:155-158) merincikan topologi partai politik tersebut, yakni :

a. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasi, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe yang meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Pertama, partai politik pragmatis merupakan partai yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu ideologi tertentu. Kedua, partai doktriner merupakan suatu partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi dan terorganisasikan secara ketat. Ketiga, partai kepentingan merupakan partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

b. Komposisi dan Fungsi Anggota

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, partai politik dapat digolongkan menjadi partai massa dan partai kader. Partai massa (patronage) ialah partai yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara

memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat juga dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Sedangkan partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin.

c. Basis Sosial dan Tujuan

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya yang membagi partai politik menjadi empat tipe, diantaranya :

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan dan Hindu.
4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

Menurut Amal, (2012:34-35) suatu tipologi partai dan sistem kepartaian hendaknya didasarkan pada beberapa diantaranya :

- a. Sumber-sumber dukungan partai. Diajukan satu perbedaan dasar komprehensif lawan sekretarian, yang termasuk komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*), yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Sedangkan partai-partai sekretarian adalah partai-partai yang

memakai kelas, daerah (*region*) atau ideologi sebagai daya tariknya. Dua tipe ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas.

- b. Organisasi Internal. Dua tipe dasar yang diajukan adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaannya terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (persyaratan) ketat untuk keanggotaannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak sama sekali bagi keanggotaannya.
- c. Cara-cara bertindak dan fungsi. Dua tipe dasar yakni *diffused* (menyebar) dan *specialized* (khusus). Partai yang terspesialisasi menekankan keterwakilan (*representativeness*), agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, partisipasi, serta kontrol terhadap pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu. Sedangkan partai-partai yang *diffused* (menyebar) menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.

Lutfi dan Iwan, (2015:29-30) menyatakan terdapat lima jenis partai politik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat komitmen suatu partai politik terhadap ideologi dan kepentingannya, diantaranya :

1. Partai Proto

Merupakan tipe awal partai politik sebelum mengalami perkembangan yang muncul sekitar abad tengah sampai akhir abad ke-19 di Eropa barat. Terdapat ciri dari partai proto, ialah adanya perbedaan antara kelompok anggota dan non-anggota dan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.

2. Partai Kader

Merupakan perkembangan dari partai proto dengan tingkat organisasi dan ideologi yang masih rendah. Muncul sebelum diterapkannya hak pilih yang membuat sangat tergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas atau individu dengan status sosial yang tinggi dengan memiliki hak pilih. Memiliki jumlah anggota yang relatif terbatas yang lebih menekankan pada kualitas dibandingkan kuantitas.

3. Partai Massa

Merupakan partai yang terbentuk diluar parlemen dengan basis massa yang luas dan ideologi yang kuat dalam memobilisasi massa. Memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat selain untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Partai massa memiliki struktur yang kompleks dan berjenjang dengan adanya mobilisasi terhadap segmentasi kelompok pemilih serta mementingkan kuantitas dibandingkan dengan kualitas.

4. Partai *Dictatorial*

Merupakan tipe partai massa yang memiliki ideologi yang kaku dan radikal dengan kontrol terhadap anggota dan rekrutmen yang sangat ketat. Biasanya partai dictatorial mengkonsolidasikan satu pemimpin utama yang mempunyai segala wewenang, baik itu berupa perekrutan anggota baru.

5. Partai *Catch-all*

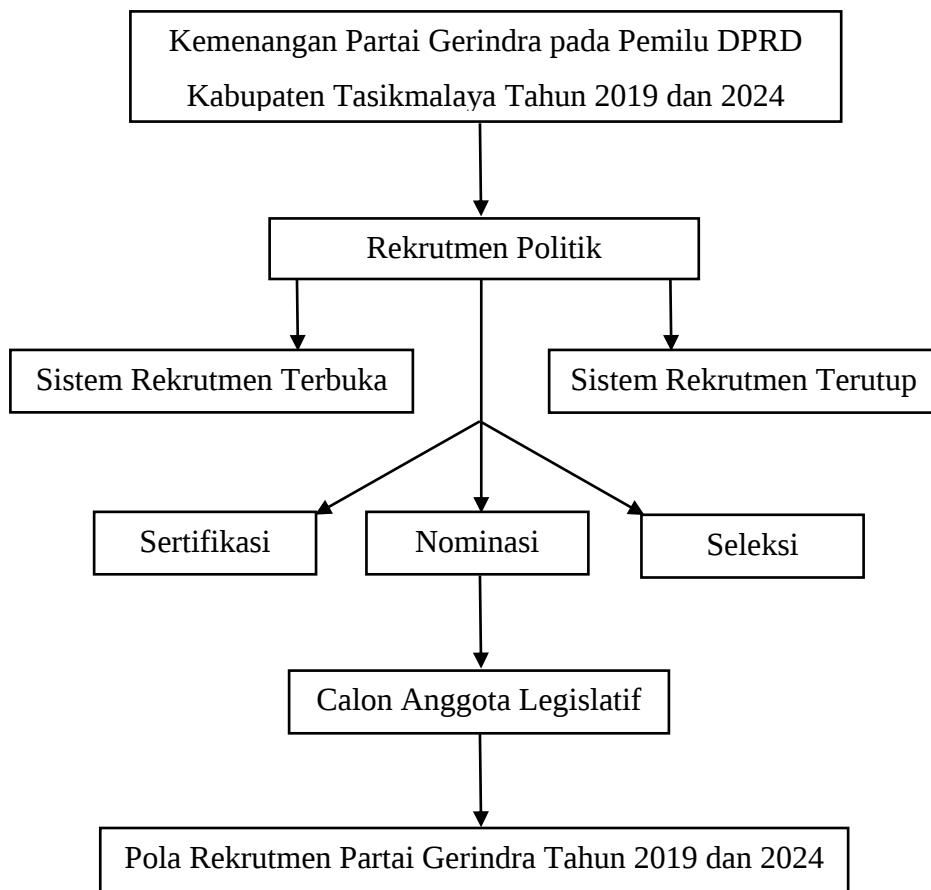
Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa yang menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk menjadi anggotanya. Partai *catch-all* memiliki tujuan untuk memenangkan pemilu dengan adanya program dan

keuntungan bagi anggotanya. Partai *catch-all* berorientasi pada kompetisi elektoral dengan meninggalkan keyakinan akan pentingnya intelektualitas dan moral kader dan mencari dukungan dimanapun hal itu dapat diperoleh.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



Penjelasan :

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran di atas, dimana fenomena kemenangan Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019 dan 2024 di analisis berdasarkan teori rekrutmen politik menurut Pippa Norris yang

digunakan sebagai *grand theory* untuk memahami bagaimana tahapan rekrutmen yang diklasifikasikannya mempengaruhi penentuan calon anggota legislatif yang akan ditetapkan oleh Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana partai politik mempersiapkan tahapan rekrutmen yang diklasifikasikan oleh Pippa Norris dalam menghadapi pemilu tahun 2019 dan 2024. Dengan begitu alur pemikiran ini dapat menjawab output penelitian terkait rumusan masalah yang telah ditentukan.